EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salsabila Firdausiah
NPP.33.0949
Program Studi : Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email : acasalsabila19@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd
Email : udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background GAP: *Pinrang Regency is one of the regions in South Sulawesi Province with a very low digital literacy rate, at 5.58% of the national target of 30%. Key issues include low levels of digital literacy, diverse demographic and geographic conditions, and limited technological infrastructure. Meanwhile, previous research has focused on urban areas with relatively adequate digital infrastructure, resulting in limited research examining the effectiveness of digital literacy in regencies with a mix of coastal, mountainous, urban, and remote rural areas, such as Pinrang Regency.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of the Population and Civil Registration Service of Pinrang Regency in increasing IKD activation.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The informants in this study numbered 15 people, consisting of 5 people from the Population and Civil Registration Office and 10 people from the community. Data analysis is based on Duncan's theory of organizational effectiveness.* ***Result :*** *The research results show that the Pinrang Regency Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) has not been effective in increasing IKD activation. From the goal achievement dimension, the national target of 30% has not been achieved, with only 5.58% achieved. From the integration dimension, coordination with external agencies remains weak, and IKD has not been made a mandatory requirement for various public services. In the adaptation dimension, many obstacles remain, including limited mobility, unstable internet connections in remote areas, and low digital literacy among the community.* ***Conclusion:*** *The Population and Civil Registration Office of Pinrang Regency is considered ineffective nationally in implementing IKD activation, despite various efforts. Strengthening cross-agency synergy and expanding outreach are needed to accelerate IKD activation.*
Keywords: *Population Administration, IKD Activation, Population and Civil Registration Service, Effectiveness, Digital Transformation.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/ Research GAP): Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian aktivasi IKD yang masih sangat

rendah yaitu sebesar 5,58% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Permasalahan utama mencakup tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, kondisi demografis dan geografis yang beragam, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital yang relatif memadai, sehingga belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas IKD di wilayah kabupeten dengan karakteristik wilayah campuran antara pesisir, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan terpencil seperti Kabupaten Pinrang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi IKD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang dari lingkup Disdukcapil dan 10 orang masyarakat. Analisis data berdasarkan pada teori efektivitas organisasi menurut Duncan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang belum efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD. Dari Dimensi pencapaian tujuan, target nasional 30% belum tercapai dengan capaian hanya 5,58%. Dari dimensi integrasi, koordinasi dengan instansi eksternal masih lemah dan IKD belum dijadikan syarat wajib di berbagai layanan publik. Pada dimensi adaptasi masih banyak hambatan yang ditemui antara lain keterbatasan sarana mobilitas, jaringan internet yang tidak stabil di wilayah terpencil, serta rendahnya literasi digital masyarakat. **Kesimpulan:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tergolong belum efektif secara nasional dalam pelaksanaan aktivasi IKD, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Penguatan sinergi lintas instansi dan perluasan jangkauan sosialisasi diperlukan untuk mempercepat capaian aktivasi IKD.
Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Aktivasi IKD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Efektivitas, Transformasi Digital.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang dipisahkan oleh wilayah perairan. Kondisi geografis ini memunculkan berbagai tantangan besar dalam pengelolaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Setiap penduduk tentu harus diberikan akses yang setara terhadap pelayanan publik, baik yang menetap di kota-kota besar maupun penduduk yang tersebar di wilayah terpencil dan kepulauan yang memiliki akses terbatas dalam infrastruktur dan aksebilitas. Pelayanan publik yang inovatif dan efisien adalah salah satu indikator yang sangat berpengaruh untuk mengukur sejauh mana kemajuan dari suatu negara (Daraba et al, 2023). Penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintah yang akan dilaksanakan memerlukan suatu sistem yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal (Daraba Dahyar, 2019). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, dan hambatan kelembagaan menghambat adopsi yang luas, khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan (Djatmiko et al., 2025). Sebagai respon atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui digitalisasi administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang diwujudkan melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan penelitian (Syafarudin & Abd Haris, 2025), Indonesia telah membuat kemajuan substansial dalam mengembangkan infrastruktur e-government dan aplikasi di berbagai tingkat pemerintahan nasional dan lokal, dengan pencapaian notable termasuk sistem identitas digital terintegrasi, platform perizinan bisnis online, dan sistem manajemen keluhan warga. Namun, implementasinya tetap tidak merata di berbagai wilayah dan institusi pemerintah, terbatas oleh faktor termasuk disparitas infrastruktur digital, literasi digital yang terbatas among warga dan pejabat, resistensi organisasi terhadap perubahan, interoperabilitas yang tidak memadai antar sistem, dan vulnerabilitas keamanan siber. Kondisi ini relevan dengan situasi yang dihadapi Kabupaten Pinrang, di mana program IKD belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Persentase aktivasi IKD Kabupaten Pinrang hanya mencapai 5,58% dari target nasional yang ditetapkan semenjak dimulainya penerapan IKD di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Desember 2022 melalui hasil launching sosialisasi penerapan IKD di Hotel Claro Makassar (Redaksi, 2023). Kondisi ini sangat ironis mengingat cakupan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Pinrang sudah mencapai 98,16% dari total 317.707 penduduk wajib KTP-el. Tujuh kategori hambatan dalam implementasi layanan digital pemerintah telah diidentifikasi, dengan hambatan institusional dan organisasional sebagai hambatan yang bersifat universal, sementara hambatan ekonomi dan teknis menjadi faktor pembatas yang kritis terutama di negara-negara berkembang (Figueredo & Silva, 2026). Hal ini mencerminkan kondisi yang nyata dihadapi Disdukcapil Kabupaten Pinrang dalam upayanya meningkatkan capaian aktivasi IKD. Rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Kondisi geografis Kabupaten Pinrang yang kompleks dengan luas wilayah 1.961,77 km² mencakup wilayah pesisir, pegunungan, dan pedesaan terpencil memperparah keterbatasan akses jaringan internet dan infrastruktur digital. Sebagian besar masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, terutama kalangan nelayan, petani, dan lanjut usia, belum merasakan urgensi penggunaan IKD karena belum dijadikan syarat wajib dalam berbagai layanan publik. Disdukcapil Kabupaten Pinrang menghadapi keterbatasan sarana, jaringan internet yang tidak stabil di wilayah terpencil, serta munculnya penipuan mengatasnamakan aktivasi IKD yang turut menurunkan kepercayaan masyarakat. Kualitas layanan terbukti menjadi faktor paling signifikan yang memengaruhi kepuasan pengguna sistem administrasi kependudukan digital, dan organisasi sektor publik menghadapi tantangan dalam menentukan faktor mana yang paling berdampak untuk ditingkatkan(Viontita & Er, 2024).

Keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan teknologi yang digunakan, melainkan juga bergantung pada sejauh mana organisasi publik mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Merujuk pada teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985), suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu menyelaraskan struktur, proses, dan sumber dayanya dengan tuntutan lingkungan eksternal yang ada. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik ditentukan oleh sinergi antara faktor internal seperti prosedur pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi, serta faktor eksternal seperti dukungan regulasi,

ketersediaan jaringan internet, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang yang hanya mencapai 5,58% dari target nasional 30% tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi. Dari sisi internal, keterbatasan sarana mobilitas, kompetensi teknis petugas lapangan, serta prosedur sosialisasi yang belum menjangkau seluruh wilayah menjadi hambatan yang nyata. Sementara dari sisi eksternal, kondisi geografis Kabupaten Pinrang yang kompleks mencakup wilayah pesisir, pegunungan, dan pedesaan terpencil dengan keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum dijadikannya IKD sebagai syarat wajib dalam berbagai layanan publik turut memperlemah upaya percepatan aktivasi IKD. Keberhasilan digitalisasi layanan kependudukan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang akurat dan berkelanjutan (Ripa'i, 2018).

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi IKD menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Disdukcapil berdasarkan tiga dimensi teori efektivitas organisasi Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data dan teori guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap karakteristik wilayah Kabupaten Pinrang yang beragam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Transformasi digital dalam administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan integrasi data kependudukan secara nasional. Meskipun program ini telah didukung oleh regulasi yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, pencapaian aktivasi IKD di berbagai daerah masih menunjukkan disparitas yang tinggi, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah dengan capaian aktivasi IKD yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 5,58% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%, padahal cakupan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Pinrang telah mencapai 98,16%. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya efektivitas pelaksanaan program IKD di Kabupaten Pinrang meskipun potensi dasar masyarakat untuk melakukan aktivasi sudah sangat besar.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai IKD lebih terfokus pada kajian strategi percepatan, difusi inovasi, dan implementasi aplikasi secara umum, atau pada daerah perkotaan dengan infrastruktur digital yang relatif memadai. Hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah yang memiliki karakteristik geografis campuran antara wilayah pesisir, pegunungan, dan pedesaan terpencil seperti Kabupaten Pinrang, yang mana kondisi tersebut turut mempersulit pemerataan akses layanan dan sosialisasi program IKD kepada seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, masih sangat minim kajian yang secara khusus menggunakan pendekatan teoritis efektivitas organisasi Duncan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan, integrasi antar lembaga, dan kemampuan adaptasi Disdukcapil dalam menghadapi kendala lokal yang ada di Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait kurangnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD di daerah dengan karakteristik wilayah yang kompleks seperti Kabupaten Pinrang, serta belum optimalnya strategi yang digunakan oleh Disdukcapil dalam menyesuaikan program nasional ke dalam konteks lokal yang ada.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi IKD menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan yang mencakup tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Urgensi dilaksanakannya penelitian ini terletak pada kebutuhan mendasar untuk menghasilkan data empiris yang dapat menggambarkan secara objektif sejauh mana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam mendorong peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, yang selanjutnya dapat dijadikan pijakan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis yang lebih terukur dan kontekstual di tengah berbagai kendala yang dihadapi. Tanpa adanya penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan Disdukcapil tidak akan memiliki peta permasalahan yang jelas dan terverifikasi secara ilmiah untuk memahami akar penyebab rendahnya capaian aktivasi IKD yang hingga tahun 2025 baru menyentuh angka 5,58% dari target nasional sebesar 30%, sehingga setiap kebijakan yang diambil berisiko berpijak pada asumsi semata dan tidak mencerminkan kondisi faktual masyarakat Kabupaten Pinrang. Pada akhirnya, tanpa evaluasi yang sistematis dan berbasis teori, program aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang berpotensi terus berjalan di tempat tanpa perbaikan yang berarti dan semakin jauh dari target yang telah ditetapkan secara nasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai wilayah Indonesia. Studi-studi ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas implementasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diadopsi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing.

Ramadhani dan Prakoso mengkaji proses difusi inovasi aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori difusi inovasi Rogers, yang berfokus pada tahapan difusi, saluran komunikasi, serta faktor yang memengaruhi adopsi masyarakat terhadap aplikasi IKD (Ramadhani & Prakoso, 2025).Kharisma dkk. meneliti strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam percepatan aktivasi IKD di Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan manajemen strategis David & David yang mencakup tiga tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi, dengan objek penelitian Disdukcapil Kota Surabaya dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Kharisma dkk., 2025). Nursyarif dkk. meneliti sosialisasi Identitas Kependudukan Digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Samarinda pada revolusi digital menggunakan metode pendampingan langsung dan dokumentasi kegiatan, dengan fokus pada pelaksanaan aktivasi

IKD di berbagai lokasi strategis seperti Kaltim Fest, rumah sakit, dan kampus (Nursyarif dkk., 2024). Nurdiana dan Ayumi mengkaji implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam konteks e-government menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nurdiana & Ayumi, 2024). Maulidya dan Widiyarta meneliti optimalisasi layanan aktivasi IKD dalam mendukung transformasi digital administrasi kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori optimalisasi Sidik yang mencakup tiga indikator tujuan, keputusan alternatif, dan disposisi (Maulidya & Widiyarta, 2024). Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan dominasi penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan beragam pendekatan teoritis.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya secara substantif dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai Identitas Kependudukan Digital. Kebaruan pertama terletak pada penggunaan kerangka teori efektivitas organisasi Duncan dengan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sebagai pisau analisis untuk mengkaji efektivitas program aktivasi IKD. Penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian Ramadhani dan Prakoso (Dewi Ramadhani & Prakoso, 2025) menggunakan teori difusi inovasi Rogers, Kharisma dkk. (P. et al., 2025) menggunakan pendekatan manajemen strategis David & David, Nurdiana dan Ayumi (Nurdiana & Ayumi, 2024) menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, serta Maulidya dan Widiyarta (Maulidya & Widiyarta, 2024) menggunakan teori optimalisasi Sidik. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan dalam mengkaji program aktivasi IKD, sehingga penelitian ini menghadirkan perspektif teoritis yang baru dalam kajian administrasi kependudukan digital di Indonesia.

Kebaruan kedua terletak pada konteks lokus penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seluruh penelitian terdahulu dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital yang relatif memadai seperti Kota Samarinda, Kota Surabaya, dan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini secara khusus dilaksanakan di Kabupaten Pinrang yang memiliki karakteristik geografis campuran antara wilayah pesisir, pegunungan, dan pedesaan terpencil dengan keterbatasan infrastruktur digital yang kompleks. Konteks wilayah non-perkotaan dengan tantangan geografis yang beragam ini belum pernah menjadi lokus dalam penelitian tentang efektivitas aktivasi IKD sebelumnya, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan empiris yang selama ini belum terjawab dalam literatur.

Kebaruan ketiga terletak pada temuan empiris yang dihasilkan penelitian ini, yaitu ditemukannya sebuah kondisi yang paradoks di mana tingginya kepemilikan KTP-el yang telah mencapai 98,16% ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian aktivasi IKD yang justru masih sangat rendah yaitu hanya 5,58%. Kondisi ini menarik karena secara logis seharusnya tingginya kepemilikan KTP-el dapat mempermudah proses aktivasi IKD, namun kenyataannya justru sebaliknya. Temuan seperti ini belum pernah dibahas secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai faktor-faktor di luar aspek teknis yang ternyata turut berperan besar dalam menghambat masyarakat

untuk menggunakan layanan digital kependudukan, khususnya di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam memahami efektivitas organisasi pemerintah daerah di tengah perubahan menuju layanan yang berbasis digital.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang tidak dapat diukur hanya melalui angka atau data statistik semata. Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan terkait pelaksanaan program aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang berdasarkan tiga dimensi teori efektivitas organisasi menurut Duncan (1985) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pihak memiliki pemahaman dan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan program aktivasi IKD. Sedangkan untuk informan masyarakat menggunakan teknik *incidental sampling* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan dimana siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian dan dipandang memenuhi kriteria sebagai sumber data yang relevan dan dapat langsung dijadikan informan. Teknik ini dipilih untuk informan masyarakat karena masyarakat Kabupaten Pinrang yang berinteraksi dengan program aktivasi IKD tersebar secara acak di berbagai wilayah dengan latar belakang yang sangat beragam, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan secara terencana sebelumnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Ketiga informan kunci ini dipilih karena memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang.

Informan pendukung terdiri dari operator atau petugas teknis aktivasi IKD, tim sosialisasi lapangan serta masyarakat Kabupaten Pinrang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Informan dari kalangan masyarakat dipilih secara sengaja untuk mewakili keberagaman karakteristik

demografis dan geografis Kabupaten Pinrang guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aksesibilitas, pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap program aktivasi IKD.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif terus dilakukan secara terus menerus dan interaktif sampai tuntas hingga mencapai titik kejenuhan data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Simangunsong, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang merupakan organisasi yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan program aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang sekaligus sebagai lokus utama yang memiliki permasalahan capaian aktivasi IKD yang masih sangat rendah. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 5-24 Januari 2026 yang mencakup seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari observasi awal, pelaksanaan wawancara, hingga pengumpulan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencapaian Tujuan

Indikator pertama yang menjadi pengukuran dalam dimensi pencapaian tujuan yaitu ketepatan waktu pencapaian target aktivasi IKD. Menurut Steers (1985), efektivitas organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut (Hoek et al., 2018) menyatakan bahwa kejelasan tujuan (*goal clarity*) berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Semakin jelas target yang ditetapkan, semakin besar kemungkinan organisasi mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dianalisis melalui sejauh mana tujuan, target, dan indikator aktivasi IKD dipahami serta diimplementasikan oleh seluruh pelaksana program.

Target aktivasi IKD nasional untuk Kabupaten sebesar 30%, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar 0,54% untuk tahun 2023. Ketidaktercapaian target ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, Disdukcapil Kabupaten Pinrang belum mampu menggerakkan sasaran dengan kuat sehingga terjadi penundaan awal dari jadwal yang direncanakan dimana pencapaian aktivasi IKD diharapkan mampu mencapai target nasional pada tahun pertama ini. Memasuki tahun kedua yaitu tahun 2024, berbagai upaya sosialisasi mulai dilakukan tetapi capaian aktivasi hanya meningkat tipis menjadi 2,91% dari target tahunan yang seharusnya sudah mencapai 30%. Kesenjangan ini semakin menunjukkan bahwa laju pertumbuhan aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang tidak sebanding dengan target waktu yang ditetapkan sehingga indikator ketepatan waktu kembali tidak terpenuhi. Hingga pertengahan tahun 2026, akumulasi capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang masih stagnan di angka 6,43%. Perbandingan ini mempertegas bahwa upaya percepatan yang dilakukan belum mampu mengatasi hambatan yang ada sehingga realisasi kinerja berada jauh dari kurun waktu yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan mencapai target tahunan secara berturut-turut menjadi bukti nyata bahwa indikator ketepatan waktu pencapaian target tidak tercapai. Keterlambatan ini

tidak hanya menjadi masalah teknis tahunan, tetapi menjadi kendala mendasar dalam perencanaan waktu. Kegagalan mencapai target setiap tahunnya membuat beban target terus bertumpuk sehingga pencapaian aktivasi IKD di kabupaten Pinrang mengalami keterlambatan dalam mencapai target sasaran akhir.

Tabel 3.1
Capaian Aktivasi IKD Kabupaten Pinrang
Tahun 2024 – April 2026

Bulan	Total Aktivasi	Capaian Kumulatif (%)
Jan 2024	983	0,59
Feb 2024	921	1,15
Mar 2024	225	1,29
Apr 2024	116	1,36
Mei 2024	221	1,49
Jun 2024	242	1,64
Jul 2024	241	1,79
Agu 2024	540	2,12
Sep 2024	449	2,39
Okt 2024	375	2,62
Nov 2024	350	2,83
Des 2024	131	2,91
Jan 2025	172	3,01
Feb 2025	520	3,32
Mar 2025	287	3,49
Apr 2025	222	3,62
Mei 2025	713	4,04
Jun 2025	523	4,37
Jul 2025	556	4,71
Agu 2025	157	4,81
Sep 2025	221	4,94
Okt 2025	454	5,21
Nov 2025	334	5,41
Des 2025	300	5,59
Jan 2026	338	5,79
Feb 2026	465	6,07
Mar 2026	382	6,30
Apr 2026	187	6,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang 2026

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, hingga bulan April Tahun 2026 capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 6,43% dimana angka ini terlihat meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 5,58%. Angka tersebut masih sangat jauh dari target aktivasi IKD yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil yakni sebesar 30% sebagai target kebijakan atau kinerja nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka percepatan penerapan IKD. Dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Disdukcapil

Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa "Target sebesar 30% harus kita penuhi, lalu bisa tercapai atau tidaknya kembali kepada kemampuan daerah. Apabila melihat lagi dari kemampuan daerah, pasti ada banyak kendala sehingga mengakibatkan target tersebut tidak bisa tercapai." Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang tentunya berusaha untuk terus meningkatkan aktivasi IKD meskipun masih menemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya terutama kondisi geografis wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari pegunungan, pesisir, perkotaan dan wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota.

Wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Batam, menghadapi urgensi tinggi terhadap validitas data kependudukan yang mutakhir, khususnya dalam mendukung mobilitas lintas wilayah dan sistem pelayanan publik berbasis digital (Hutasoit, 2023). Dalam konteks ini, penggunaan sistem digital seperti IKD menjadi instrumen penting dalam memastikan integritas dan keakuratan data. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Dukcapil diukur dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di wilayah wilayah yang sulit diakses, serta menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika kependudukan.

Mengacu pada observasi yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang menunjukkan angka yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagian besar masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD berasal dari kalangan ASN, tenaga kesehatan pelajar dan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas. Sedangkan pada masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan dan kalangan lanjut usia masih sangat minim dalam melakukan aktivasi IKD. Keberhasilan program aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang tidak luput dari peran penting tim sosialisasi Disdukcapil Kabupaten Pinrang serta staff yang bertugas memberikan pelayanan aktivasi IKD agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui manfaat dari IKD. Dengan adanya sosialisasi akan menumbuhkan motivasi serta mendorong masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh bagi capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang untuk membantu pencapaian target nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan di Kecamatan Suppa, dapat dilihat bahwa penerimaan masyarakat terhadap IKD masih beragam. Bapak Onding, seorang nelayan yang diwawancarai pada tanggal 10 Januari 2026 di rumahnya beliau menyampaikan bahwa ia pernah mendengar informasi mengenai IKD ketika pihak Disdukcapil datang ke kecamatan. Namun, ia belum melakukan aktivasi karena belum memahami secara jelas manfaat dari IKD. Bagi beliau, KTP-el dalam bentuk kartu fisik dianggap sudah cukup untuk digunakan dalam keseharian beliau. Selain itu, faktor kebiasaan juga menjadi alasan beliau belum tertarik untuk mengaktivasi IKD.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori efektivitas menurut Duncan melalui wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang belum mencapai hasil yang diharapkan dalam aktivasi IKD dari segi dimensi pencapaian tujuan yang diukur dengan indikator kurun waktu pencapaian tujuan dan jumlah target aktivasi IKD. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, realisasinya masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hasil akhir belum sesuai harapan, tetapi Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah berupaya dan tetap menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki capaian aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang pada masa yang akan datang.

3.2 Integrasi

Peranan penting Disdukcapil Kabupaten Pinrang dalam aktivasi IKD pada dimensi Integrasi dilihat dari kemampuan Disdukcapil dalam membangun keterpaduan kerja antara unsur internal organisasi dan pihak eksternal yang menjadi sasaran layanan. Disdukcapil sebagai instansi pelaksana pada program aktivasi IKD selain berfungsi sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, juga berfungsi sebagai penggerak sinkronisasi, penyebar informasi, dan penghubung antara program pemerintah dengan masyarakat.

Jemput bola menjadi salah satu bentuk koordinasi eksternal yang tengah gencar dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang untuk mendukung aktivasi IKD, dimulai dari kantor kecamatan hingga kantor kelurahan agar masyarakat dapat mengakses layanan aktivasi IKD dengan jarak yang lebih dekat tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Namun antusiasme masyarakat masih tergolong rendah dalam pelaksanaan jemput bola ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Bapak Andi Sigit Saputra, S.E. ketika diwawancarai pada tanggal 13 Januari 2026, beliau mengungkapkan bahwa selama turun langsung ke lapangan, masyarakat sangat susah diajak untuk melakukan pengaktivasian karena masyarakat hanya ingin melakukan aktivasi apabila ada kepentingan yang mendesak. Selain menyasar kecamatan dan kelurahan, Disdukcapil juga melakukan koordinasi eksternal dengan sekolah-sekolah pada saat pelaksanaan perekaman KTP-el bagi siswa yang sudah cukup umur, di mana setelah perekaman selesai pihak Disdukcapil langsung meminta siswa tersebut untuk mengaktivasi IKD. Meskipun demikian, koordinasi eksternal yang telah dibangun masih terbatas pada upaya perluasan jangkauan aktivasi IKD semata dan belum melibatkan seluruh pihak strategis yang dapat mendukung pemanfaatan IKD secara lebih luas.

Koordinasi internal di Disdukcapil Kabupaten Pinrang berjalan melalui pembagian tugas kepada para staf, penyamaan persepsi mengenai prosedur pelayanan, serta sinergi antara Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga pertukaran data dan informasi dapat berjalan efisien dan status kependudukan dapat diakses secara real-time oleh semua bidang yang terkait.

Selain koordinasi, keberhasilan sosialisasi juga menjadi indikator penting dalam dimensi integrasi. Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah melaksanakan sosialisasi melalui instagram, facebook, dan website dengan menyampaikan informasi dalam bentuk poster, infografis, dan pengumuman singkat yang mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan apa yang ditekankan oleh (Madjid et al, 2024) bahwa keberhasilan layanan berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah daerah, baik secara interpersonal maupun digital, di mana komunikasi yang responsif, transparan, dan edukatif mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Namun, sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya inklusif karena masih bersifat satu arah dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi digital seperti kalangan nelayan, petani, lanjut usia, dan masyarakat di wilayah terpencil. Madjid et al. (2024) menegaskan pentingnya membangun keterlibatan masyarakat melalui strategi komunikasi dua arah yang inklusif terhadap berbagai segmen masyarakat, sementara

kondisi yang ada di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa hal tersebut belum terwujud secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi integrasi, dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang telah menunjukkan upaya dalam membangun keterpaduan pelaksanaan program IKD melalui koordinasi internal, koordinasi eksternal, dan sosialisasi. Namun ketiganya belum berjalan secara optimal karena koordinasi eksternal masih terbatas, sosialisasi belum menghasilkan respons yang seragam dan merata di seluruh lapisan masyarakat, serta strategi komunikasi yang diterapkan belum memenuhi prinsip komunikasi inklusif sebagaimana yang ditekankan oleh (Madjid et al, 2024). Oleh karena itu, dimensi integrasi dapat dinilai sudah berjalan namun belum efektif dan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

3.3 Adaptasi

Dimensi adaptasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan mengubah standar operasional prosedur secara dinamis, merespons kondisi masyarakat, keterbatasan lapangan, serta perkembangan teknologi yang menjadi dasar penerapan IKD. Dalam penelitian ini, dimensi adaptasi diukur melalui dua indikator yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana.

Pada indikator pertama, Disdukcapil Kabupaten Pinrang menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik melalui penyesuaian terhadap setiap pembaruan sistem dan fitur aplikasi IKD yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Setiap perubahan dikomunikasikan kepada seluruh staf agar pelayanan tetap berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Peningkatan kemampuan staf dilakukan melalui bimbingan internal dan pembinaan teknis yang bersifat praktis sesuai kebutuhan pelayanan. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Pinrang juga telah memanfaatkan teknologi berbasis artificial intelligence dalam proses verifikasi identitas sebagai wujud nyata penyesuaian organisasi terhadap perkembangan teknologi pelayanan publik digital.

Pada indikator kedua, ketersediaan sarana dan prasarana di Disdukcapil Kabupaten Pinrang secara umum sudah cukup memadai. Ruang pelayanan yang tertata rapi, bersih, sejuk, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas mencerminkan kesiapan Disdukcapil dalam menghadirkan lingkungan pelayanan yang nyaman. Perangkat pendukung seperti laptop, komputer, printer, scanner, dan kamera tersedia dalam kondisi baik dan mendukung kelancaran proses aktivasi IKD baik di kantor maupun saat pelayanan lapangan. Meski demikian, keterbatasan pada sarana mobilitas dan jaringan internet di wilayah terpencil masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi adaptasi Disdukcapil Kabupaten Pinrang dapat dinilai sudah berjalan cukup baik melalui penyesuaian SOP, peningkatan kapasitas staf, pemanfaatan teknologi digital, dan penyediaan sarana prasarana dasar. Namun demikian, efektivitas pada dimensi ini belum sepenuhnya optimal sehingga masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang dapat berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan yang mencakup tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, diperoleh temuan utama bahwa Disdukcapil Kabupaten Pinrang belum efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD dengan capaian hanya sebesar 5,58% dari target nasional 30%. Temuan ini selanjutnya didiskusikan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Ramadhani & Prakoso, 2025)yang mengkaji difusi inovasi aplikasi IKD di Kota Samarinda, bahwa tingkat adopsi IKD di berbagai daerah masih tergolong rendah akibat hambatan rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data. Temuan penelitian ini memperkuat temuan (Ramadhani & Prakoso, 2025)karena permasalahan serupa juga ditemukan di Kabupaten Pinrang, di mana rendahnya literasi digital terutama pada kalangan lanjut usia, nelayan, dan petani serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet di wilayah pegunungan dan pesisir menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian target aktivasi IKD. Meskipun demikian, terdapat perbedaan konteks yang signifikan antara kedua penelitian ini, di mana penelitian (Ramadhani & Prakoso, 2025)dilakukan di wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital yang relatif lebih memadai, sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten dengan karakteristik geografis yang lebih kompleks sehingga hambatan yang dihadapi bersifat lebih struktural dan sulit diatasi dalam jangka pendek.

Sama halnya dengan temuan penelitian Kharisma dkk. (P. et al., 2025) yang meneliti strategi percepatan aktivasi IKD di Kota Surabaya, bahwa meskipun berbagai strategi seperti jemput bola, sosialisasi, dan kerja sama lintas stakeholder telah dilaksanakan dengan baik, realisasi capaian aktivasi IKD masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Kabupaten Pinrang, di mana berbagai upaya serupa seperti pelayanan jemput bola ke kecamatan dan kelurahan, sosialisasi melalui media sosial, serta program Dukcapil Goes to School telah dilaksanakan namun capaian aktivasi IKD tetap masih sangat jauh dari target nasional. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Kharisma dkk. bahwa strategi yang baik sekalipun belum cukup untuk mendorong partisipasi masyarakat apabila tidak disertai dengan penguatan regulasi yang mewajibkan penggunaan IKD dalam berbagai layanan publik sebagai pemicu urgensi di kalangan masyarakat.

Berbeda dengan temuan penelitian Nurdiana dan Ayumi (Nurdiana & Ayumi, 2024) yang mengkaji implementasi IKD di Disdukcapil Kota Tanjungpinang menggunakan teori Edward III, yang menemukan bahwa koordinasi dan pembagian kerja antar bidang berjalan cukup baik meskipun terdapat kekurangan personel. Temuan penelitian ini menunjukkan kondisi yang relatif serupa dalam hal koordinasi internal, namun berbeda dalam hal koordinasi eksternal. Di Kabupaten Pinrang, koordinasi eksternal yang dibangun masih sangat terbatas dan belum melibatkan seluruh pihak strategis seperti perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan publik lainnya untuk menjadikan IKD sebagai syarat wajib dalam mengakses layanan. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, di mana Kota Tanjungpinang sebagai kota yang lebih kompak secara geografis memungkinkan

koordinasi eksternal yang lebih mudah dibangun dibandingkan Kabupaten Pinrang yang memiliki wilayah luas dengan 12 kecamatan yang tersebar.

Berbeda dengan temuan penelitian Nursyarif dkk. (Muhammad Khumaidi Nursyarif et al., 2023) yang mengevaluasi sosialisasi IKD di Kota Samarinda dan menemukan bahwa antusiasme masyarakat tergolong tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi IKD yang dilaksanakan di berbagai lokasi strategis. Temuan penelitian ini justru menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana antusiasme masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mengikuti sosialisasi dan aktivasi IKD masih sangat rendah, dan masyarakat cenderung hanya mau melakukan aktivasi apabila ada kepentingan yang mendesak. Temuan ini menolak temuan penelitian Nursyarif dkk. karena perbedaan karakteristik objek penelitian yang sangat signifikan, di mana masyarakat perkotaan yang menjadi objek penelitian Nursyarif dkk. memiliki tingkat literasi digital yang jauh lebih tinggi dan lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan masyarakat Kabupaten Pinrang yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan tinggal di wilayah dengan akses teknologi yang terbatas.

Sama halnya dengan temuan penelitian Maulidya dan Widiyarta (Maulidya & Widiyarta, 2024) yang meneliti optimalisasi layanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya, bahwa upaya optimalisasi layanan aktivasi IKD sudah dapat dikategorikan cukup baik namun belum mencapai pemerataan yang maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum menyadari urgensi kepemilikan IKD. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Kabupaten Pinrang, di mana berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil sudah menunjukkan itikad baik dalam meningkatkan aktivasi IKD, namun hasilnya belum optimal karena kesadaran masyarakat terhadap urgensi IKD masih sangat rendah. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Maulidya dan Widiyarta bahwa permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi IKD merupakan tantangan yang bersifat universal dan tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu saja, melainkan menjadi permasalahan bersama yang dihadapi oleh Disdukcapil di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan di Kabupaten Pinrang jauh lebih kompleks dibandingkan temuan Maulidya dan Widiyarta karena selain faktor kesadaran masyarakat, terdapat faktor geografis dan infrastruktur yang turut memperparah rendahnya capaian aktivasi IKD.

Secara keseluruhan, diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan rendahnya capaian aktivasi IKD merupakan fenomena yang bersifat lintas wilayah dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Pinrang semata. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tersendiri karena mengkaji permasalahan tersebut menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi Duncan di wilayah dengan karakteristik geografis campuran yang belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga temuan penelitian ini melengkapi dan memperkaya khasanah penelitian mengenai IKD di Indonesia dengan perspektif yang lebih kontekstual dan komprehensif.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama pada tiga dimensi teori Duncan, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang turut memengaruhi efektivitas Disdukcapil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi IKD. Faktor pendukung yang ditemukan

antara lain tingginya cakupan kepemilikan KTP-el yang telah mencapai 98,16% sebagai modal dasar percepatan aktivasi IKD, komitmen Disdukcapil yang tercermin dari berbagai upaya pelayanan jemput bola, program Dukcapil Goes to School, dan sosialisasi melalui media sosial, serta tersedianya sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai termasuk pemanfaatan teknologi berbasis artificial intelligence dalam proses verifikasi identitas.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang bersifat struktural maupun teknis. Secara struktural, belum adanya regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan IKD sebagai syarat dalam mengakses layanan publik seperti perbankan, BPJS, dan KUA menyebabkan masyarakat tidak memiliki dorongan yang kuat untuk segera melakukan aktivasi IKD karena KTP-el fisik masih dapat digunakan dalam seluruh keperluan administratif sehari-hari. Secara teknis, keterbatasan hanya satu unit mobil dinas untuk melayani 12 kecamatan serta ketidakstabilan jaringan internet di wilayah pegunungan dan pesisir secara langsung membatasi jangkauan pelayanan yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang.

Temuan menarik lainnya yang bersifat eksternal adalah munculnya kasus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang yang berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut, serta ditemukannya disparitas capaian aktivasi IKD yang sangat mencolok antar kecamatan di mana kecamatan di pusat perkotaan seperti Watang Sawitto dan Paleteang memiliki capaian jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan di wilayah terpencil seperti Batulappa dan Lembang. Kedua temuan ini menggambarkan bahwa permasalahan rendahnya aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis semata, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektor.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital belum berjalan secara efektif, dikarenakan capaian aktivasi IKD yang hanya mencapai 5,58% dari target nasional 30% dengan dimensi pencapaian tujuan yang belum terpenuhi, dimensi integrasi yang belum optimal akibat terbatasnya koordinasi eksternal dan belum meratanya pemahaman masyarakat, serta dimensi adaptasi yang sudah berjalan namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana mobilitas, jaringan internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan ini memperluas kajian efektivitas organisasi publik dalam konteks transformasi digital administrasi kependudukan di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks. Guna meningkatkan efektivitas aktivasi IKD di Kabupaten Pinrang, disarankan untuk memperkuat koordinasi eksternal dengan instansi strategis seperti perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan publik lainnya agar IKD dapat dijadikan syarat wajib dalam mengakses layanan sehingga mendorong urgensi aktivasi di kalangan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang juga seyogianya mampu merumuskan regulasi daerah yang mendukung percepatan aktivasi IKD serta meningkatkan infrastruktur digital dan pendampingan literasi digital kepada masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan wilayah dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokus yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagai organisasi yang secara

langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan program aktivasi IKD, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung pada Disdukcapil di kabupaten atau kota lain yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan infrastruktur yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat terbatas pada satu lokus dan satu pendekatan teoritis, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada Disdukcapil di kabupaten atau kota lain yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa dengan Kabupaten Pinrang, guna memperoleh perbandingan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program aktivasi IKD di wilayah dengan tantangan infrastruktur digital yang kompleks. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda atau metode campuran kualitatif dan kuantitatif agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas aktivasi IKD di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azka Kharisma Putri Imada, Firli Imansa Syafirlana, Kharimatun Nisa, Lia Meylani Widyawati, & Rheanda Abi Aufa. (2025). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Journal of Governance Innovation*, *7*(1), 313–329. https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5800

Daraba Dahyar, Rudi Salam, Indra Dharma Wijaya, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi, Universitas Negeri Makassar, Politeknik Negeri Malang, Universitas Pamulang, dan Sumatera Barat. 2023. "Membangun Pelayanan Publik yang Inovatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia Building Innovative and Efficient Public Services in." 5(1).

Daraba Dahyar. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.* Makassar: Leisyah.

Dewi Ramadhani, K. P., & Prakoso, C. T. (2025). Difusi Inovasi Aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *6*(3), 1841–1851. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4348

Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability*, *17*(7), 2908. https://doi.org/10.3390/su17072908

Hutasoit, I. (2023). Population growth in Batam Municipality as the frontier and outermost region at the border between Indonesia–Singapore–Malaysia. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 12(2), 165–176. https://doi.org/10.20473/jbk.v12i2.2023.165-176

Jr, E. F. (2026). *Challenges of Digital Services in Public Administration in the Era of Digital Transformation : A Systematic Literature Review*. https://doi.org/10.1007/s13132-026-

03277-z

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *16*(1), 48–61. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778

Maulidya, Dinta & Widiyarta, Agus. (2024). Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. VISA: Journal of Vision and Ideas. 4. 10.47467/visa.v4i1.1544. DOI: 47467/visa.v4i1.1544

Muhammad Khumaidi Nursyarif, Muhamad Wahyu Tirta, Tri Wahyudi, Siti Patimah, Siti Muawwanah, & Arbansyah Arbansyah. (2023). Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Samarinda Pada Revolusi Digital. *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 56–63. https://doi.org/10.61132/pandawa.v2i1.426

Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang Implementation Of The Digital Population Identity (IKD) Application At Disdukcapil Tanjungpinang City. *Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, *1*(2), 50–58. https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141

Redaksi. 2023. "Disdukcapil Pinrang Mulai Mengaktivasi IKD, Sasaran Utama Pegawai Pemerintah." Makassar Kabar. http://kabarmakassar.com/news/disdukcapil-pinrang-mulai-mengaktivasi-ikd-sasaran-utama-pegawai-pemerintah (November 27, 2025).

Ripa'i,Ahmad (2018). PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU SINGLE IDENTITY NUMBER DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal. Dukcapil : Vol.6, No.1 - Juni 2018

Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Syafarudin, S., & Abd Haris. (2025). Digital Transformation in Public Services: A Study of E-Government Implementation in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, *2*(4), 169–179. https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.797

van der Hoek M, Groeneveld S, Kuipers B. Goal Setting in Teams: Goal Clarity and Team Performance in the Public Sector. Rev Public Pers Adm. 2018 Dec;38(4):472-493. doi: 10.1177/0734371X16682815. Epub 2016 Dec 19. PMID: 30473594; PMCID: PMC6207990. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X16682815

Viontita, S. C., & Er, M. (2024). SciensceDirect ScienseDirect Evaluation of Surabaya population administration & civil registration systems using DeLone & McLean information system success model, Procedia Computer Science, Volume 234, 2024, Pages 1154-1163, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.111.